

**REKONSTRUKSI BIOSENTRISME DALAM KRISIS LINGKUNGAN:
KRITIK ATAS KEBIJAKAN DESENTRALISASI PENGELOLAAN
SAMPAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



OLEH:

ADHIMAS ALIFIAN YUWONO

NIM:23205012002

TESIS

Diajukan Kepada Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas
Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Agama (M.Ag)

YOGYAKARTA

2025

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1980/Un.02/DU/PP.00.9/11/2025

Tugas Akhir dengan judul : REKONSTRUKSI BIOSENTRISME DALAM KRISIS LINGKUNGAN: KRITIK
ATAS KEBIJAKAN DESENTRALISASI PENGELOLAAN SAMPAH DI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ADHIMAS ALIFIAN YUWONO, S.Pd.
Nomor Induk Mahasiswa : 23205012002
Telah diujikan pada : Kamis, 06 November 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6916e68d2efda

Ketua Sidang

Dr. Mutiullah, S.Fil.I. M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 6916e1a42ea5

Penguji I

Dr. Muhammad Fatkhan, S.Ag M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 6916efbbaad81

Penguji II

Prof. Dr. H. Shofiyullah MZ, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 691ac12fa1f64

Yogyakarta, 06 November 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Adhimas Alifian Yuwono
NIM : 23205012002
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi : Filsafat Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Oktober 2025

Saya yang menyatakan,



Adhimas Alifian Yuwono
NIM. 23205012002

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Adhimas Alifian Yuwono
NIM : 23205012002
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi : Filsafat Islam

Menyatakan bahwa naskah **tesis** ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah **tesis** ini terdapat plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Oktober 2025

Saya yang menyatakan,



Adhimas Alifian Yuwono
NIM. 23205012002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

REKONSTRUKSI BIOSENTRISME DALAM KRISIS LINGKUNGAN:
KRITIK ATAS KEBIJAKAN DESENTRALISASI PENGELOLAAN SAMPAH
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yang ditulis oleh:


Nama : Adhimas Alifian Yuwono
NIM : 23205012002
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi : Filsafat Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 16 Oktober 2025

Pembimbing



Dr. Mutiullah, S.Pd.I., M.Hum

NIP. 197912132006041005

MOTTO

*~ Ketika Pohon Terakhir Telah Ditebang, Dan Ikan Terakhir Telah Ditangkap,
Barulah Manusia Menyadari Bahwa Ternyata Uang Tidak Dapat Dimakan ~*

(Eric Weiner)



PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada siapapun yang mau membacanya!!



ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kompleksitas persoalan pengelolaan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pasca ditetapkannya kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah. Kebijakan desentralisasi dirancang untuk memindahkan tanggung jawab pengelolaan sampah dari pusat (Provinsi) ke tiga wilayah regional yaitu Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul, dengan tujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keterlibatan masyarakat. Namun, kebijakan ini masih menimbulkan problematika etis yang bercorak antroposentris seperti ketidakpastian pelaksanaan, ketidakseimbangan sasaran kebijakan pengelolaan sampah, serta dampak lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat terdampak di sekitar tempat pengelolaan sampah. Artinya, problem yang muncul tidak hanya berkutat pada persoalan teknis-prosedural belaka, tetapi menyangkut problem filosofis-paradigmatik, dan pada bagian itulah penelitian ini dijalankan. Studi ini menawarkan rekonstruksi etika lingkungan biosentrisme yang menekankan perlindungan terhadap komunitas biotis secara holistik sebagai kritik terhadap antroposentrisme sekaligus basis kesadaran filosofis dalam konteks pengelolaan sampah. Rekonstruksi dilakukan dengan cara mengelaborasi konsep-konsep biosentrisme, meliputi: *respect for live, land etichs*, anti-spesiesisme, dan *bio-transcendentalisme* untuk dikontekstualisasikan pada kebijakan desentralisasi.

Penelitian ini merupakan kualitatif yang menggunakan triangulasi metode berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan para pemangku kepentingan, aktivis lingkungan, hingga masyarakat. Observasi dan dokumentasi dilakukan untuk memverifikasi kondisi aktual di wilayah regional DIY. Data kemudian diklasifikasikan berdasarkan kerangka teori dimensi etika politik dan dianalisis dalam bingkai biosentrisme melalui langkah reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Hasil penelitian ini adalah, *pertama*, kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah di DIY mengandung nuansa antroposentrisme yang kuat sehingga masih menimbulkan berbagai masalah mulai dari ketidakpastian regulasi, lemahnya responsivitas dan pengawasan, ketidakseimbangan sasaran, terjadinya pembuangan sampah ilegal, hingga konflik sosial terkait dampak lingkungan. *Kedua*, rekonstruksi paradigmatik biosentrisme diusulkan dengan menekankan manusia sebagai pelaku moral dalam komunitas biotis. Dengan prinsip penghormatan terhadap kehidupan, pengelolaan sampah perlu didesain agar menjaga integritas, stabilitas, dan keindahan lingkungan serta keadilan lingkungan bagi warga terdampak. Selain itu, narasi sakralitas-teologis lingkungan amat penting dilakukan untuk mendukung praktik pengelolaan sampah. Pada akhirnya, penelitian ini merekomendasikan adanya regulasi yang ketat terkait pengendalian sampah bagi industri pariwisata, pengurangan produksi sampah sejak dari sumber, serta pengelolaan yang ramah lingkungan dengan jaminan keamanan biosentris di wilayah regional demi keberlanjutan lingkungan hidup di DIY.

Kata Kunci: Kebijakan Desentralisasi, Pengelolaan Sampah, Etika Lingkungan Biosentrisme

ABSTRACT

This study was motivated by the complexity of waste management issues in the Special Region of Yogyakarta (DIY) following the enactment of a decentralized waste management policy. The decentralization policy was designed to transfer responsibility for waste management from the central government (province) to three regional areas, namely Sleman Regency, Yogyakarta City, and Bantul Regency, with the aim of improving effectiveness, efficiency, and community involvement. However, this policy still raises anthropocentric ethical issues such as uncertainty in implementation, imbalance in waste management policy objectives, and environmental impacts felt by affected communities around waste management sites. This means that the problems that arise are not only technical and procedural, but also philosophical and paradigmatic, and it is in this area that this research is conducted. This study offers a reconstruction of biosentrist environmental ethics that emphasizes holistic protection of biotic communities as a critique of anthropocentrism and a basis for philosophical awareness in the context of waste management. The reconstruction is carried out by elaborating on the concepts of biosentrisme, including: respect for life, land ethics, anti-speciesism, and bio-transcendentalism to be contextualized in decentralization policies.

This study is qualitative in nature and uses triangulation methods in the form of interviews, observations, and documentation. Interviews were conducted with stakeholders, environmental activists, and the community. Observations and documentation were carried out to verify the actual conditions in the DIY region. The data was then classified based on the theoretical framework of political ethics and analyzed within the framework of biocentrism through reduction, presentation, and conclusion drawing to answer the research questions.

The results of this study are, first, that the decentralized waste management policy in DIY contains strong anthropocentric nuances, which still cause various problems ranging from regulatory uncertainty, weak responsiveness and supervision, imbalance of objectives, illegal waste disposal, to social conflicts related to environmental impacts. Second, a paradigmatic reconstruction of biosentrisme is proposed by emphasizing humans as moral actors in the biotic community. Based on the principle of respect for life, waste management needs to be designed to maintain the integrity, stability, and beauty of the environment as well as environmental justice for the affected residents. In addition, narratives about theological sacredness of the environment are very important to support waste management practices. Ultimately, this study recommends strict regulations on waste control for the tourism industry, reduction of waste production at the source, and environmentally friendly management with biospheric security guarantees in the region for environmental sustainability in DIY.

Keywords: Decentralization Policy, Waste Management, Biocentric Environmental Ethics

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Agung sekaligus Maha Welas Asih. Atas keagungan-Nya, Dia memberi peringatan atas jalan yang salah, dan dengan Welas Asih-Nya, Dia memberi bimbingan dan ampunan dengan cinta. Berkat segala izin, karunia, limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, penulis telah berhasil menyelesaikan tesis ini dengan judul “*Rekonstruksi Biosentrisme Dalam Krisis Lingkungan: Kritik Atas Kebijakan Desentralisasi Pengelolaan Sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta*”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah-melimpah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh sahabat dan keluarganya, dan dengan kebaikan itu, mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaatnya.

Penulisan tesis ini merupakan proses pengumpulan intelektual yang panjang, dan penuh tantangan. Maka dari itu, selesainya tesis ini tidak luput dari peran banyak pihak yang membantu penulis baik secara moral maupun material. Ucapan terimakasih yang paling utama penulis sampaikan kepada Ibu tercinta Endang Dwi Supriyanti, beliau adalah satu-satunya sosok di muka bumi ini yang menjadi alasan penulis untuk tetap hidup dan berjuang. Selain itu, kepada Ayahanda Ari Yuwono penulis juga ucapkan terimakasih atas do’a, motivasi, dan bimbingan yang telah diberikan. Adik kandung penulis, yaitu Naufal Muhammad Yuwono, ucapan terimakasih penulis sampaikan atas segala canda dan tawa, dukungan positif dan motivasi yang telah diberikan, hal itu amat membantu penulis untuk terus bersemangat.

Selain itu, penulis mengakui bahwa selama masa penulisan tesis dan studi jenjang Magister di UIN Sunan Kalijaga, penulis tidak akan mampu menyelesaikannya tanpa kontribusi dari banyak pihak. Maka dari itu, beberapa ucapan terimakasih yang tulus penulis sampaikan kepada beberapa pihak berikut:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.d., selaku rector UIN Sunan Kalijaga beserta seluruh jajaran kepengurusannya.
2. Prof. Dr. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan pemikiran Islam beserta seluruh jajaran kepengurusannya.
3. Dr. Muhammad Fatkhan, S.Ag., M.Hum., dan Muhammad Arif, S.Fil.I., M.Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Aqidan dan Filsafat Islam beserta seluruh jajaran kepengurusannya.
4. Dr. Mutiullah, S.Fil.I., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, ide, arahan, masukan, koreksi, sekaligus motivasi kepada penulis dari awal proses bimbingan hingga akhir penelitian.
5. Dr. Muhammad Fatkhan., S.Ag., M.Hum., dan Prof. Dr. H. Shofiyullah MZ., S.Ag., M.Ag selaku penguji Tesis pada sidang Munaqosyah penulis yang telah memberikan kritik, dan saran konstruktif untuk menjadikan Tesis ini berkualitas. Masukan tentang praksis implementasi biosentrisme dari Dr. Muhammad Fatkhan, dan masukan teoritis-koseptual tentang bio-transendentalisme dari Prof. Dr. Shofiyullah, menjadikan Tesis ini semakin komprehensif secara data dan muatan filosofisnya.
6. Prof. Dr. Zuhri, S.Ag., M.Ag., selaku dosen pembimbing akademik penulis yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diskusi akademik.

7. Para dosen di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, khususnya yang telah mengajar penulis: Dr. Imam Iqbal, Dr. Alim Roswanto, Dr. Fahrudin Faiz, Prof. Al-Makin, Prof. Fatimah Hussien, Prof. Ahmad Muttaqin, Dr. Ustadzi Hamzah, Prof. Robby Habiba Abror, Dr. Novian Widiadharma, Dr. Muhammad Taufik, Dr. Waryani Fajar Riyanto, Dr. Najib Kailani, Dr. Andri Rosadi, Prof. Inayah Rohmaniyah, dan Prof. Shofiyullah Muzammil. Berkat beliau semua, penulis dapat memperoleh ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan yang amat bermanfaat bagi hidup penulis.
8. Kepada teman-teman MAFI kelas A 2023: Mas Imdad, Mas Zamzami, Ardhy, Yahya, Akmal, Akbar, Asyraf, Iwan, Taufik, Fatih, Mbak Zaenab, Erlinda, Delavia, yang telah menjadi teman diskusi konstruktif selama proses studi di kampus maupun di luar kampus.
9. Kepada Fatimah Tuzaroh, terimakasih dari dalam hati yang paling tulus penulis ucapkan atas segala dukungan, do'a, waktu, motivasi, inspirasi yang telah diberikan. Terimakasih Fat, atas segala diskusi, cerita, ide, canda, tawa, suka, duka, dan cinta yang telah kamu berikan.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa Tesis ini masih penuh dengan kekurangan, maka, segala bentuk kritik, saran, dan masukan akan dengan lapang hati penulis terima.

Yogyakarta, 27 Agustus 2025
Penulis

Adhimas Alifian Yuwono

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Metode Penelitian.....	16
F. Kerangka Teori.....	20
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II MEMAHAMI DISKURSUS ETIKA LINGKUNGAN, PERSOALAN SAMPAH, DAN POLITIK LINGKUNGAN HIDUP.....	27
A. Tentang Etika Lingkungan.....	27
1. Genealogi Etika Lingkungan.....	27
2. Distingsi Teori-Teori Etika Lingkungan	32
3. Urgensi Etika Lingkungan.....	38
B. Konseptualisasi Etika Lingkungan Biosentrisme.....	40
1. <i>Respect for Live</i>	41

2. <i>Land Ethics</i>	45
3. Anti-Spesiesisme	47
4. <i>Bio-Transcendentalisme</i>	49
C. Rekonstruksi Konseptual Biosentrisme	51
D. Tentang Persoalan Sampah	54
1. Sampah dan Dualitas Potensi	54
2. Sampah dan Kesadaran Kemanusiaan	59
E. Politik Lingkungan Hidup	61
1. Korelasi Penyelenggaraan Pemerintah dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup	61
2. Korelasi Undang-Undang Perlindungan dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup	63
BAB III KEBIJAKAN DESENTRALISASI PENGELOLAAN SAMPAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PROBLEMATIKANYA	65
A. Tentang Kebijakan Desentralisasi	65
1. Deskripsi dan Latar Belakang Kebijakan	65
2. Tujuan Kebijakan Desentralisasi	69
3. Skema Penerapan Kebijakan	72
4. Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan	74
B. Tentang Persoalan Sampah Di Daerah Istimewa Yogyakarta	76
C. Memetakan Problematika Etis dalam Kebijakan Desentralisasi Pengelolaan Sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta	79
1. Dimensi Tujuan	79
2. Dimensi Sarana	81
3. Dimensi Pelaksanaan	87
BAB IV EGO ANTROPOSENTRISME DAN TAWARAN FILOSOFIS PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS ETIKA LINGKUNGAN BIOSENTRISME	99
A. Antroposentrisme dalam Kebijakan Desentralisasi: Kritik Biosentrisme..	99
1. Evaluasi Non-Biosentrisme Atas Inkonsistensi Kebijakan	102
2. Ego Antroposentrisme Sebagai Penghambat Responsivitas dan Kepekaan Lingkungan	104

3. Dominasi Manusia atas Manusia Lain dalam Ketidakseimbangan Sasaran Kebijakan.....	105
4. Sikap Menyakiti Lingkungan dalam Pembuangan Sampah Ilegal.....	106
5. Penolakan Masyarakat Sebagai Cermin Diskriminasi Lingkungan	108
B. Rekonstruksi Biosentrisme Dalam Kebijakan Desentralisasi	108
1. Pengelolaan Sampah Berlandaskan Kesadaran Manusia Sebagai Pelaku Moral.....	109
2. Implikasi Etika Bumi dalam Praksis Pengelolaan Sampah.....	111
3. Anti-Spesiesisme Pengelolaan Sampah untuk Mencapai Kebahagiaan Biotis.....	112
4. Kesalehan Lingkungan Melalui Praksis Pengeloaan Sampah.....	115
C. Rekomendasi Biosentrisme dan Refleksi Kritis.....	116
1. Rekomendasi Filosofis Biosentrisme	116
2. Mencari Jalan Keluar: Refleksi Islam Terhadap Biosentrisme	117
BAB V PENUTUP.....	123
A. Kesimpulan	123
B. Keterbatasan Penelitian.....	124
C. Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	135
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	142

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1** Gerbang utama TPST Piyungan, Kabupaten Bantul yang telah ditutup. 64
- Gambar 2** Tumpukan sampah di trotoar jembatan, Juminahan, Suryatmajan, Danurejan, Kota Yogyakarta. 84
- Gambar 3** Tumpukan sampah di Jalan Kenari, Kota Yogyakarta. 85
- Gambar 4** Tumpukan sampah di median Jalan Affandi (Gejayan) Demangan, Kota Yogyakarta. 85
- Gambar 5** Tumpukan sampah di Jalan Adisucipto, depan Ambarukmo Plaza, Kabupaten Sleman. 86
- Gambar 6** Tumpukan sampah di pinggir jalan utara Gembira Loka (GL) Zoo dan Ringroad Selatan tepatnya Sokowaten, Tamanan, Banguntapan, Bantul. 87
- Gambar 7** Penolakan masyarakat terhadap TPS3R Karangmiri, Kota Yogyakarta. 90
- Gambar 8** Spanduk Protes Warga Akibat Polusi yang dihasilkan dari TPST Sendangsari, Kabupaten Sleman. 92
- Gambar 9** Eks Tempat Pembuangan Sementara, di Pantai Pandansari, Kabupaten Bantul. 94

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Instrumen Penelitian.125
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian.132
Lampiran 3	Draft Kebijakan Desentralisasi Pengelolaan Sampah.133
Lampiran 4	Dokumentasi. 135



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Distingsi Teori-Teori Etika Lingkungan.38
Tabel 2	Rekomendasi Filosofis Biosentrisme.117



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan kebijakan pemerintah yang memutuskan untuk memindahkan proses pengelolaan sampah yang semula terpusat (sentralisasi) menjadi terdesentralisasi. Kebijakan ini mulai diterapkan secara resmi sejak 1 Mei 2024, dilanjutkan dengan pembentukan satuan tugas yang dibentuk pada tanggal 8 Agustus 2024.¹ Sebagai langkah awal dari kebijakan tersebut, adalah dilakukannya penutupan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan sebagai pusat pengelolaan yang selama ini menampung sampah dari tiga wilayah regional, yakni Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul. Kebijakan ini dikeluarkan dengan tujuan agar setiap daerah memiliki kemandirian dalam mengelola sampahnya sesuai karakteristik daerah masing-masing. Di samping juga kondisi TPST Piyungan yang sudah mengalami *overload* sehingga sudah tidak dapat digunakan untuk menampung sampah dari wilayah regional.²

¹ Hamengku Buwono X, "Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 314/Kep/2024 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Desentralisasi Pengelolaan Sampah Oleh Kabupaten/Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta" (2024).

² Berdasarkan data terakhir di tahun 2023 (tahun sebelum ditetapkan kebijakan desentralisasi) menunjukkan bahwa setiap harinya DIY menghasilkan sejumlah 1.231,55 ton sampah yang keseluruhannya di buang di penampungan akhir yaitu Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan. Padahal, kapasitas penampungan sampah di sana hanyalah sebesar 450,00 ton/hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa sampah yang berada di TPST piyungan mengalami *overload*. Lihat: "Pengelolaan Sampah Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang" (Yogyakarta: Bappeda Yogyakarta, 2023), https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/208-pengelolaan-sampah.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menegaskan bahwa desentralisasi ini memungkinkan wilayah kabupaten/kota untuk menemukan solusi pengelolaan sampah yang paling tepat dan sesuai kebutuhan lokal. Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab bersama dalam pengelolaan dan pengurangan sampah, melalui edukasi dan partisipasi aktif dalam memilah dan mengolah sampah sejak dari sumbernya. Dengan adanya kemandirian pengelolaan, diharapkan persoalan sampah dapat ditangani lebih efektif dan berkelanjutan di tingkat lokal.³

Meski secara normatif kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah memiliki tujuan yang positif dan progresif, dalam implementasinya muncul berbagai problematika yang menghambat efektifitas pengelolaan. Salah satu permasalahan utama yang ditemukan adalah praktik pembuangan sampah ilegal yang masih marak di beberapa wilayah, yang mengindikasikan belum optimalnya sistem pengawasan maupun kesiapan dalam melakukan pengelolaan sampah secara desentralisasi. Selain itu, penolakan masyarakat terhadap pendirian TPST di beberapa wilayah juga sering terjadi, terutama karena kekhawatiran akan dampak lingkungan dan kesehatan yang mungkin timbul. Penolakan ini menunjukkan adanya konflik kepentingan antara kebutuhan pengelolaan sampah dengan kepentingan dan kenyamanan masyarakat setempat.⁴ Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa di balik

³ Haris, Wawancara Umum, Kantor Balai Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Daerah Istimewa Yogyakarta, 4 Maret 2025, Pukul 09.10-10.00 WIB.

⁴ Hasil Observasi di tiga wilayah regional: Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul. April-Juni 2025.

tujuan baik dari kebijakan desentralisasi terdapat tantangan sosial dan ekologis yang masih perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Berdasarkan analisis penulis, problematika yang muncul dalam kebijakan desentralisasi ini tidak hanya diakibatkan oleh persoalan teknis prosedural-belaka, tetapi menyangkut problem filosofis-paradigmatik, yakni melekatnya paradigma antroposentrisme di dalam kebijakan tersebut. Dalam diskursus etika lingkungan, paradigma antroposentrisme diyakini sebagai penyebab utama atas terjadinya krisis lingkungan.⁵ Dalam antroposentrisme, manusia memahami dirinya sebagai pusat dari segala kepentingan. Sehingga, perlakuannya terhadap alam bersifat dominasi-eksploitatif tanpa memperdulikan seluruh ekosistem yang ada di dalamnya, asalkan manusia diuntungkan, alam akan dimekanisasi untuk meraup keuntungan ekonomis belaka. Alam semesta bagaikan suatu mesin penghasil keuntungan yang didekati dengan dominasi dan kontrol. Suatu alam yang kering makna, bukan alam yang dipandang dengan penuh rasa hormat, cinta, kerja sama, dialog, dan dijiwai.⁶ Ironisnya, perlakuan dominasi-eksploitatif terhadap alam ini

⁵ Antroposentrisme merupakan paradigma yang menyakini manusia sebagai pusat dari keseluruhan kehidupan, sehingga alam semesta dianggap ada untuk memenuhi kebutuhan manusia. Para filsuf seperti Aristoteles, Thomas Aquinas, Rene Descartes, dan Immanuel Kant pada intinya menegaskan bahwa manusia, sebagai makhluk rasional, memiliki hak untuk menggunakan alam demi kepentingannya. Namun, W.H. Murdi agak berbeda dengan menilai bahwa selama manusia mengelola alam untuk kepentingannya tanpa melakukan eksploitasi yang merusak, itu masih bisa diterima. Lalu F. Fraser Darling mengembangkannya lagi dengan menempatkan manusia sebagai makhluk biologis unggul (Aristokrat Biologis) yang memiliki kekuasaan atas makhluk lain, dan dengan kekuasaan tersebut mengharuskan manusia untuk melayani dan menjaga alam, alih-alih menggunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenang. Pandangan Darling ini mendorong kesadaran bagi individu maupun institusi sosial seperti pemerintah dan perusahaan untuk menjaga lingkungan demi kesejahteraan bersama. Selengkapnya, lihat: Sonny A Keraf, *Etika Lingkungan Hidup* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), 52-54.

⁶ Sonny A Keraf, *Filsafat Lingkungan Hidup: Alam Sebagai Sebuah Sistem Kehidupan* (Yogyakarta: Kanisius, 2024), 14.

merambah pada dominasi manusia atas manusia yang lainnya: terjadi penindasan oleh yang berkuasa terhadap yang lemah.⁷ Jadi, antroposentrisme ini tidak hanya bersifat destruktif bagi alam, tetapi juga bagi kemanusiaan itu sendiri.

Sebagai bagian dari kritik terhadap antroposentrisme, paradigma biosentrisme muncul pertama kali dengan pandangan radikal yang menyatakan bahwa sejatinya manusia dan makhluk hidup lainnya itu setara dan meniscayakan perlakuan yang sama pula (*equal treatment*). Biosentrisme memandang bahwa yang bernilai adalah kehidupan, maka, gerakan biosentrisme populer dengan istilah *reverence for life* (hormat sedalam-dalamnya terhadap kehidupan). Kerangka biosentrisme melihat manusia justru bernilai karena ada kehidupan yang melekat kepadanya dan, kehidupan itu tidak hanya ada dalam diri manusia, ia juga ada pada makhluk hidup lainnya: hewan dan tumbuhan. Adapun komponen abiotis seperti tanah, air, udara, dan sejenisnya juga harus dijaga lantaran dari itulah kehidupan tercipta dan dapat terus berlangsung. Maka, biosentrisme menekankan bahwa manusia merupakan anggota dari komunitas biotis, dan sesama anggota adalah setara dan harus saling menjaga, inilah yang pada akhirnya disebut dengan “komunitas moral”, bahwa perlakuan yang baik terhadap alam tidak hanya demi kepentingan manusia itu sendiri, melainkan didasarkan pada motif penjagaan terhadap nilai kehidupan di seluruh alam. Paradigma ini menggeser

⁷ Lailiy Muthmainnah, Rizal Mustansyir, and Sindung Tjahyadi, “Kapitalisme, Krisis Ekologi, Dan Keadilan Intergenerasi: Analisis Kritis Atas Problem Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia,” *Mozaik Humaniora* 20, no. 1 (2020): 57, <https://doi.org/10.20473/mozaik.v20i1.15754>.

penyusutan nuansa “pusat” pada manusia, menjadi kesetaraan sesama makhluk hidup. Biosentrisme inilah yang akan penulis gunakan untuk memberikan tawaran filosofis atas nuansa antroposentrisme yang terjadi dalam kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah di DIY.

Dalam pencerminan penulis, problematika yang muncul dalam kebijakan desentralisasi ini diakibatkan oleh paradigma antroposentrisme, yang menyebabkan kerugian pada, komunitas biotis manusia, yakni masyarakat yang dirugikan akibat adanya suatu kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan sekaligus tindakan dari masyarakat yang membuang sampah sembarangan, dan komunitas biotis non-manusia, yakni pencemaran lingkungan, misalnya pencemaran tanah dan air akibat air lindi,⁸ yang dapat berakibat fatal bagi pohon dan juga binatang (organisme) yang meminumnya. Kerugian akibat pengelolaan sampah pasca kebijakan desentralisasi ini dirasakan utamanya oleh manusia, yang pada akhirnya juga berimbas pada alam dan makhluk hidup lainnya. Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis hendak menawarkan rekonstruksi paradigma etika lingkungan biosentrisme sebagai tawaran filosofis tentang cara memandang alam yang diaktualisasikan dalam konteks pengelolaan sampah. Sebelumnya, Etika lingkungan itu sendiri merupakan cabang filsafat yang mempelajari bagaimana seharusnya manusia

⁸ Air lindi merupakan cairan berbahaya yang terbentuk ketika air hujan meresap ke dalam tumpukan sampah, melarutkan bahan organik dan anorganik, serta mengandung zat beracun dan logam berat. Dalam beberapa penelitian diungkapkan bahwa air lindi amat mencemari air Sungai dan Sumur. Lihat: Harnung wulan Dari and Suhartini, “Dampak Pengolahan Air Lindi Terhadap Kualitas Air Sungai Dan Sumur Di Sekitar TPA Regional Piyungan Yogyakarta,” *Bioscientist : Jurnal Ilmiah Biologi* 12, no. 1 (2024): 71–91, <https://doi.org/doi.org/10.33394/bioscientist.v12i1.9601>.

berhubungan dengan alam.⁹ Dalam diskursusnya, etika lingkungan memiliki berbagai paradigma, yakni seperti ekosentrisme yang menempatkan alam sebagai pusat,¹⁰ eko-feminisme yang mengkritik dominasi manusia atas alam,¹¹ serta etika lingkungan Islam yang mengedepankan keseimbangan dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi.¹²

Dipilihnya biosentrisme lantaran penulis merasa cocok dengan objek material dalam penelitian ini, yakni kebijakan desentralisasi. Kebijakan ini menggambarkan dominasi manusia atas manusia yang lainnya, dimana telah terjadi kerugian lingkungan yang dialami oleh masyarakat sekitar tempat pengelolaan sampah di wilayah regional yang diakibatkan oleh kekuasaan manusia lain. Selain itu, tidak adanya regulasi ketat terhadap industri pariwisata menunjukkan betapa egoisme antroposentrisme tampak mendominasi. Akibat panjang dari itu, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya pencemaran lingkungan yang lebih luas di masing-masing wilayah

⁹ Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, 45-47.

¹⁰ Gagasan ini sangat populer dicetuskan oleh Arne Naess dengan prinsip *deep ecology* yang menilai bahwa alam mempunyai nilai intrinsik yang melekat padanya. Prinsip ini adalah pandangan khas dari etika lingkungan ekosentrisme yang memusatkan perhatian pada hak alam secara intrinsik. Lihat: Arne Naess, "The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement: A Summary," *Inquiry* 16 (1973): 95–100, <https://doi.org/doi.org/10.1080/00201747308601682>.

¹¹ Salah satu tokoh populer dalam gerakan ini adalah Vandana Shiva, yang mengkritik pembangunan yang eksploitatif terhadap lingkungan. Ia menegaskan bahwa model pembangunan yang maskulin dan kapitalistik telah mengorbankan keseimbangan ekologis serta mengabaikan peran perempuan dalam menjaga dan memelihara lingkungan. Eko-feminisme menuntut keadilan ekologis dan gender, serta mengusulkan model pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan menghargai peran perempuan serta kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan. Lihat: Bernadus Wibowo Suliantoro and Caritas Woro Murdiati, *Perjuangan Perempuan Mencari Keadilan & Menyelamatkan Lingkungan; Telaah Kritis Etika Ekofeminis Vandana Shiva* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019), 16-17.

¹² Salah satu tokoh besar yang menggagas paradigma ini adalah Seyyed Hossein Nasr, yang menegaskan bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari tugas kekhalifahan manusia dan merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Islam mengajarkan prinsip tawazun (keseimbangan), mizan (keadilan), dan islah (perbaikan), yang menuntut manusia untuk tidak berbuat kerusakan (fasad) di bumi. Sayyed Hossein Nasr, *Knowledge and the Sacred* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981), 169.

regional. Maka, biosentrisme harus ditegakkan demi kesejahteraan lingkungan bersama agar persoalan sampah mampu diatasi dengan pertimbangan biosentris mulai dari hulu hingga ke hilir.

Penelitian ini penting untuk memperkuat khazanah keilmuan filsafat, khususnya dalam bidang etika lingkungan, agar tampil lebih kontekstual dan aplikatif terhadap permasalahan aktual di lapangan. Secara akademis, penelitian ini menyumbang pemahaman mendalam tentang bagaimana paradigma biosentrisme dapat digunakan sebagai alat analisis filosofis untuk evaluasi kebijakan dalam konteks pengelolaan sampah. Secara praktis, hasil kajian ini dapat menjadi bahan evaluasi reflektif bagi pemerintah daerah, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas dalam rangka meningkatkan efektivitas dan keadilan pengelolaan sampah melalui desentralisasi. Dengan analisis yang komprehensif dan etis, kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah dapat dikembangkan sehingga tidak hanya memenuhi aspek teknis, tetapi juga aspek moral dan sosial yang menjadi basis keberlanjutan lingkungan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis menyusun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kritik etika lingkungan biosentrisme atas kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana rekonstruksi etika lingkungan biosentrisme dalam kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini secara filosofis adalah untuk mengetahui bagaimana filsafat dapat berfungsi untuk menjelaskan problem yang tampak pada realitas aktual dan menunjukkan urgensi atas pembacaan filsafat. Dalam penelitian ini, diskursus etika lingkungan, khususnya etika lingkungan biosentrisme menemukan titik urgensinya untuk diletakkan dalam memberikan kritik filosofis atas problematika pada kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah diketahui adanya problematika yang objektif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil analisis, kritik dan rekomendasi berdasarkan studi etika lingkungan biosentrisme terhadap problematika tersebut.

Adapun kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan praktis. Kegunaan teoritis berupa data akademik tentang problematika, dan analisis etika lingkungan biosentrisme pada kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah yang dikeluarkan oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini juga dapat menjadi data teoritis awal untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang filsafat etika lingkungan dalam berbagai aspek kehidupan. Adapun kegunaan praktis penelitian ini adalah dapat berguna untuk menyajikan analisis reflektif tentang studi etika lingkungan terhadap kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah di DIY. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai pijakan awal untuk proses evaluasi, perbaikan, maupun tindak lanjut yang lebih dalam terkait dengan kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah di DIY.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan serta relevansi sebagai data pembanding sekaligus untuk menegaskan bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya. Dalam tinjauan pustaka ini penulis akan menyajikan penelitian terdahulu yang terpublikasi dalam setidaknya lima tahun terakhir, dengan fokus kajian pada pengelolaan sampah yang diteliti melalui berbagai disiplin keilmuan. Di tahun 2025 Ikhlasi dan Firdaus¹³ mencoba mengidentifikasi permasalahan pengelolaan sampah di DIY dari perspektif kerja sama antar daerah dan peran kelembagaan pasca diterapkannya kebijakan desentralisasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat regulasi pengelolaan sampah, dalam implementasinya masih kurang optimal, hal tersebut dikarenakan lemahnya koordinasi antar kabupaten/kota, disintegrasi kelembagaan formal, rendahnya partisipasi masyarakat, serta penggunaan teknologi yang masih terbatas. Penelitian tersebut merekomendasikan agar kerjasama lintas sectoral dilakukan secara optimal dan terintegrasi. Di sisi lain, Faiz dan Nuruddin¹⁴ dalam penelitiannya mencoba mengkomparasikan tata kelola sampah di Yogyakarta pasca di tutupnya TPST Piyungan dengan daerah Banyumas. Hasil penelitian tersebut

¹³ Hurairah Haqi Ikhlasi and M Sandy Firdaus, "Identifikasi Permasalahan Pengelolaan Sampah Di Daerah Istimewa Yogyakarta: Perspektif Kerjasama Antar Daerah Dan Peran Kelembagaan," *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau* 5, no. 1 (2025): 32–40, <https://appdev.ipdn.ac.id/jtpm/article/view/5117>.

¹⁴ Faiz Kasyfilham and Nuruddin Al Akbar, "Evaluasi Tata Kelola Sampah Yogyakarta Pasca-Piyungan: Studi Komparatif Dengan Model Ekonomi Sirkular Banyumas," *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik* 10, no. 1 (2025): 152–81, <https://doi.org/10.25077/jakp.10.1.152-181.2025>.

menunjukkan keunggulan Banyumas di berbagai sisi tentang pengelolaan sampah, diantara yang paling tampak adalah karena unggulnya kapasitas kelembagaan lokal, kerjasama kolaboratif antar sektor, dan kemampuan memanfaatkan teknologi yang tepat-kontekstual. Sementara itu, Yogyakarta cenderung mengalami stagnasi akibat fragmentasi institusi sektoral, minimnya literasi pemilahan sampah, dan kurangnya insentif partisipatif.

Di tahun 2024, penelitian oleh Amir Hidayatullah, dkk¹⁵ melaporkan tentang pengabdaiannya yang telah melakukan kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah di Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta dengan tingkat efektivitas yang baik. Selain itu, Ma'arif, dkk¹⁶ yang meneliti tentang adanya upaya kolaboratif antara Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Yogyakarta dengan Badan Usaha Milik Kelurahan Mukti Lestari, di Kawasan Wisata Pantai Baru, Poncosari, Yogyakarta. Kegiatannya berupa sosialisasi pemakaian alat pirolisis (pengurai senyawa – senyawa kimia yang dilakukan dengan cara pemanasan tanpa tercampur dengan udara luar) kepada masyarakat sekitar, penelitian ini menunjukkan adanya upaya dari masyarakat dan akademisi untuk mengatasi krisis sampah di DIY. Dalam taraf filosofis penelitian Riskidianto¹⁷ mencoba melakukan refleksi terhadap konsep etika

¹⁵ Amir Hidayatullah et al., “Penguatan Upaya Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Kota Yogyakarta” (Yogyakarta: Seminar Nasional Hasil Pengabdian kepada Masyarakat, 2024), 693–700, https://www.researchgate.net/profile/GeaDwiAsmara/publication/381856361_Penguatan_Upaya_Pengelolaan_Sampah_Rumah_Tangga_Kota_Yogyakarta/links/6682a080f3b61c4e2ca108ba/Penguatan-Upaya-Pengelolaan-Sampah-Rumah-Tangga-Kota-Yogyakarta.pdf.

¹⁶ Syamsul Ma'arif, Agustinus Eko Susetyo, Nurhaidi, Tri Aji Purnomo, Emi Pratiwi Alfandy, Alif Utama, M akyas Abdurrahman, “Pelatihan Penggunaan Alat Pirolisis Sampah Organik Di Pantai Baru Bersama Bumkal Mukti Lestari Poncosari,” *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* 7, no. 1 (2024): 55–62, <https://doi.org/doi.org/10.24912/jbmi.v7i1.28027>.

¹⁷ Benedictus Bima Riskidianto, “Etika Lingkungan Arne Naess Dan Implementasinya Dalam Memperbaiki Kerusakan Lingkungan Akibat Sampah,” *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat*,

lingkungan Arne Naess untuk diimplementasikan dalam hal memperbaiki kerusakan lingkungan akibat sampah. Hasil penelitian ini mengusulkan beberapa solusi reflektif-filosofis dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengelola sampah, mengurangi konsumsi produk potensi sampah dan mendesak konstruksi regulasi tentang pengelolaan sampah yang berbasis ekologis. Senada dengan hal itu, penelitian yang dilakukan oleh Budiman,¹⁸ meninjau salah satu kebijakan pengelolaan sampah di DIY yang tertuang dalam Peraturan Daerah No. 3 tahun 2013 melalui perspektif etika lingkungan ekosentrisme. Dalam analisisnya, ia mengungkapkan bahwa Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2013 yang mengatur pengelolaan sampah amat bertujuan antroposentris, yakni menekankan kesejahteraan manusia. Walaupun kecenderungan antroposentris amat kuat, kebijakan ini telah mencoba memadukan elemen-elemen ekosentrisme yang terlihat pada usaha teknologi ramah lingkungan dan partisipasi masyarakat.

Di tahun 2023, penelitian dilakukan oleh Renaldi Wijaya, dkk¹⁹ menyerukan tentang perlunya kesadaran etis dalam mengatasi kerusakan lingkungan akibat sampah. Sampah harus dikelola dengan motif menjaga nilai lingkungan, sosial, dan ekonomi. Maka kesadaran harus muncul bagi seluruh pihak untuk mengatasi sampah. Selanjutnya, Secara aplikatif, penelitian yang

Agama, Dan Kemanusiaan 10, no. 1 (2024): 89–112, <http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/yaqzhan/index>.

¹⁸ Raihan Chaerani Putri Budiman, “Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Etika Lingkungan” (Universitas Gadjah Mada, 2024), <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/245290>.

¹⁹ Renaldi Wijaya et al., “Etika Lingkungan Dalam Mengatasi Kerusakan Lingkungan Akibat Sampah,” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral* (2023) 1, no. 2 (2023): 1–17, <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/445>.

dilakukan oleh Al-Adawiyah²⁰ menunjukkan perlunya pemahaman konsep *ecosophy* dari Sayyed Hossein Nasr untuk memperkuat gerakan *zerowaste lifestyle*. Gerakan ini mencerminkan mandat manusia sebagai Khalifah yang mendapatkan mandat untuk berinovasi dalam pelestarian dan penjagaan alam sekitar. Melalui *zerowaste lifestyle*, prinsip 5R dalam menangani sampah berupa *refuse* (menolak), *reduce* (mengurangi), *reuse* (memakai kembali), *recycle* (mendaur ulang), dan *rot* (membusukan) dapat diterapkan dengan baik. Prinsip tersebut dijalankan atas landasan agar mengembalikan fitrah alam sebagai subjek yang wajib dilestarikan, alih-alih sebagai objek yang dengan mudah dieksploitasi.

Di tahun 2022, penelitian oleh Praditya²¹ dilakukan dengan berfokus pada penyelidikan dampak lingkungan pada komponen abiotik dan biotik yang disebabkan oleh pengelolaan sampah di TPST Piyungan, hasil analisisnya mengungkapkan telah terjadi pencemaran air tanah, pencemaran sungai serta udara, dan rontoknya keanekaragaman hayati di lingkungan sekitarnya. Penelitian oleh Betty, dkk,²² mencoba menunjukkan adanya efektifitas yang positif pada kegiatan bank sampah di Dusun Ceme Kabupaten Bantul yang berjalan dengan baik serta telah mengurangi pencemaran lingkungan.

²⁰ Qinthary Hawwi Al-Adawiyah, "Islam Dan Gaya Hidup Minim Sampah (Zerowaste Lifestyle): Telaah Konsep Ecosophy Sayyed Hossein Nasr," *Gunung Djati Conference Series* 24 (2023): 931–42, <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

²¹ Praditya Anggi Widhiananto, "Analisis Dampak Lingkungan Terhadap Komponen Abiotik Dan Biotik Dari Kegiatan Penanganan Sampah Pada Tpst Piyungan Di Dusun Ngablak, Kalurahan Sitimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta," *Repository UPN Veteran Yogyakarta* (UPN Veteran Yogyakarta, 2022), <http://eprints.upnyk.ac.id/29692/>.

²² Betty Epy Andani and Tri Wahyuni Sukes, "Pengelolaan Bank Sampah Melalui Rumah Pilah Alam Lestari Di Dusun Ceme Kabupaten Bantul Yogyakarta," *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia* 21, no. 2 (2022): 200–209, <https://doi.org/10.14710/jkli.21.2.200-209>.

Selanjutnya, Wardana dan Az-Zahra²³ dalam penelitiannya menawarkan untuk mengimplementasikan konsep *ecosophy* Nasr untuk menanggulangi pencemaran laut di Indonesia. Dalam penelitiannya, ia menjelaskan bahwa pencemaran laut di Indonesia disebabkan oleh ego antroposentrisme manusia serta kurang efektifnya pengelolaan sampah di darat. Selain itu, upaya penanganan pencemaran laut di Indonesia dirasa belum maksimal, masih terlihat kurangnya integrasi dalam penanganan sampah laut sebagai hasil dari kegiatan darat. Maka, diperlukan kesadaran pada semua elemen masyarakat agar mengurangi potensi pencemaran laut dari aktivitas keseharian. Maka dari itu, gagasan hubungan integral antara Tuhan, alam, dan manusia yang termuat dalam pandangan *ecosophy* Seyyed Hossein Nasr menjadi suatu tawaran filosofis dalam mengatasi kerusakan laut.

Di tahun 2021, Fitriani dan Astuti²⁴ meneliti tentang pemetaan jaringan pengelolaan sampah plastik di kota Yogyakarta. Hasil penelitiannya menunjukkan pengelolaan sampah plastik pada jaringan formal yang terdiri dari rumah tangga hingga Bank Sampah dari kelurahan, PKK, pengepul, dan produsen ulang menunjukkan hasil yang cukup baik. Namun, dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat jaringan informal yang menjadikan sampah plastik sebagai media pembakaran untuk manufaktur. Jika dibiarkan, hal ini akan berakibat pada polusi udara dan dapat mengganggu kesehatan.

²³ Ghufon Akbari Wardana and Ana Azzahra, "Pencemaran Laut (Kajian Ecosophy Dalam Pandangan Seyyed Hossein Nasr Dan Refleksinya Terhadap Strategi Penanggulangan Pencemaran Laut Di Indonesia)," *Journal Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains* 4, no. 1 (2022): 43–48, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/saintek/kiiis/article/view/3283>.

²⁴ Syifa Fitriani and Amalia Yuli Astuti, "Pemetaan Jaringan Sampah Plastik Di Kota Yogyakarta," *Jurnal PASTI* 15, no. 1 (2021): 73, <https://doi.org/10.22441/pasti.2021.v15i1.007>.

Selanjutnya, penelitian oleh Ravyola²⁵ mencoba melakukan evaluasi terhadap pengelolaan sampah di Kawasan Pantai Kabupaten Bantul. Ia menyebut bahwa pengelolaan sampah belum menerapkan lima aspek, yakni aspek teknis-operasional, aspek organisasi-manajerial, aspek hukum dan peraturan, aspek pendanaan, serta aspek partisipasi masyarakat.

Di tahun 2020, penelitian oleh Haryanti, dkk²⁶ telah melakukan penyebaran angket kepada sejumlah responden di Kota Yogyakarta dan menyebutkan bahwa bank sampah telah berkontribusi dalam hal pengelolaan lingkungan hidup, yang terlihat pada kemampuan reduksi sampah sebesar 97%. Selanjutnya, penelitian oleh Yusari dan Purwohandoyo²⁷ memprediksi tentang adanya jumlah timbulan sampah di Kota Yogyakarta di tahun 2035 bisa mencapai 16.504.985,03 liter/hari.

Di tahun 2019, penelitian oleh Amalia²⁸ menunjukkan bahwa hasil kerja *outcomes* dan *output* program Bank Sampah belumlah maksimal, menurutnya, program Bank Sampah dinilai masih jauh dari kata berhasil. Meskipun juga tak bisa disebut gagal. Meskipun problematika yang menyelimuti pelaksanaan bank sampah sungguh begitu kompleks, program ini harus konsisten untuk tetap dijalankan dengan diiringi kebijakan serta inovasi baru. Selanjutnya,

²⁵ Ravyola Azzahra, "Evaluasi Pengelolaan Sampah Di Kawasan Pantai Kabupaten Bantul D.I.YOGYAKARTA" (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021), <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/31699/15513075> Ravyola Azzahra.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

²⁶ Sri Haryanti, Evi Gravitiani, and Mahendra Wijaya, "Studi Penerapan Bank Sampah Dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Yogyakarta," *Bioeksperimen: Jurnal Penelitian Biologi* 6, no. 1 (2020): 60–68, <https://doi.org/10.23917/bioeksperimen.v6i1.10434>.

²⁷ Tiaranita Yusari and Joni Purwohandoyo, "Potensi Timbulan Sampah Plastik Di Kota Yogyakarta Tahun 2035," *Jurnal Pendidikan Geografi* 25, no. 2 (2020): 88–101, <https://doi.org/10.17977/um017v25i22020p088>.

²⁸ Shafiera Amalia, "Analisis Implementasi Program Bank Sampah Di Kota Yogyakarta," *Jurnal Analis Kebijakan* 1, no. 2 (2019): 34–48, <https://doi.org/10.37145/jak.v1i2.27>.

penelitian oleh Putra, dkk²⁹ menjelaskan pentingnya peran pemerintah dalam menyusun kebijakan untuk mengatasi persoalan sampah. Dalam penelitiannya Putra, dkk membagi kebijakan pemerintah menjadi tiga sektor, apa yang disebutnya sebagai sektor formal, informal, dan semiformal. Sektor formal adalah upaya menangani sampah dari pemerintah seperti penyiapan anggaran, program pemberdayaan dan sejenisnya, sektor informal adalah kemandirian masyarakat itu sendiri yang menciptakan gerakan menangani sampah, sementara sektor semiformal adalah kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah memberikan anggaran dan sosialisasi, lalu masyarakatlah yang bertindak secara operasional di lapangan. Sektor semiformal ini dikenal sebagai bank sampah, dan sejauh ini menjadi solusi yang cukup efektif.

Dari seluruh penelitian terdahulu yang telah disajikan, secara general hanya berfokus pada dampak, penanganan, dan tawaran filosofis tentang persoalan sampah dalam berbagai konteks. Dalam kaitannya dengan objek material penelitian ini, meskipun diantaranya telah ada penelitian yang menyoroti kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah di DIY. Namun, sisi berbeda dalam penelitian ini ditampilkan dalam wacana spesifik tentang studi etika lingkungan biosentrisme terhadap problematika kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah di DIY. Penelitian ini menunjukkan fokus konkret yang aktual dan spesifik sekaligus memungkinkan adanya analisis mendalam,

²⁹ Hijrah Purnama Putra, Enri Damanhuri, and Emenda Sembiring, "Sektor Baru Pengelolaan Sampah Di Indonesia (Studi Kasus Di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman Dan Bantul)," *Jurnal Sains & Teknologi Lingkungan* 11, no. 1 (2019): 11–24, <https://doi.org/10.20885/jstl.vol11.iss1.art2>.

kritik, dan rekomendasi akademis, dimana hal itu tidak diketemukan dalam penelitian sebelumnya. Dengan demikian, orisinalitas dan aspek kebaruan (*novelty*) dari penelitian tesis ini dapat dipertanggung-jawabkan secara akademik.

E. Metode Penelitian

Agar penelitian dapat berjalan sesuai dengan prosedur ilmiah dan dapat mencapai hasil yang optimal, maka penulis menerapkan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif karena didasarkan pada perolehan atas hasil penggalian informasi yang bersumber dari responden untuk kemudian dianalisis melalui konsep keilmuan tertentu.³⁰ Dalam penelitian ini, informasi yang akan diperoleh adalah tentang problematika pada kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah di DIY, untuk dapat melakukan analisis serta tawaran rekonstruktif-filosofis etika lingkungan biosentrisme guna menghasilkan analisis mendalam, kritik, dan rekomendasi.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi metode, yakni usaha mencek keabsahan data

³⁰ Muzairi, Zuhri, Robby H Abror, and Fahrudin Faiz, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: FA Press, 2014), 40.

menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data.³¹ Triangulasi metode dalam penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Teknik wawancara dilakukan dengan model *purposive sampling*, yaitu sebuah metode dimana peneliti menentukan responden yang cocok dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan bisa menanggapi kasus penelitian.³² Adapun kriteria responden dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. Pihak otoritatif sebagai perumus atau pemangku kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah.
2. Komunitas pemerhati lingkungan di Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Masyarakat asli Daerah Istimewa Yogyakarta di wilayah regional yakni Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul yang berusia dewasa dan menjadi saksi atas dampak, atau yang bersinggungan dengan tempat pengelolaan sampah.

Berdasarkan indikator penentuan responden di atas, maka penulis memilih, *pertama* pihak perumus atau pemangku kebijakan yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Daerah Istimewa Yogyakarta, divisi Balai Pengelolaan Sampah, untuk mengumpulkan data terkait latar belakang, skema, pihak-pihak yang terlibat, dan dinamika kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah. *Kedua*, pihak komunitas

³¹ Bachri S Bachtira, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif," *Teknologi Pendidikan* 10, no. 1 (2017): 46–62, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/139619>.

³² Ika Lenaini, "Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling," *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1 (2021): 33–39, <https://doi.org/doi.org/10.31764/historis.v6i1.4075>.

pemerhati lingkungan yaitu Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Yogyakarta yang merupakan komunitas aktivis lingkungan yang cukup konsen terhadap isu lingkungan, khususnya pandangan-pandangannya tentang efektivitas pengelolaan sampah di DIY. *Ketiga*, adalah 3 orang masyarakat asli DIY yang mewakili masing-masing wilayah regional, yang terdampak, atau bersinggungan dengan tempat pengelolaan sampah sebagai akibat dari adanya kebijakan desentralisasi. Hal ini diperlukan untuk menggali informasi tentang problematika yang terjadi.

Selanjutnya, teknik dokumentasi yang penulis gunakan adalah dengan cara mendapatkan draft putusan hukum terkait kebijakan, serta melakukan pengumpulan berbagai karya ilmiah berupa buku, tesis, disertasi, artikel jurnal, website pemberitaan media, dan laporan statistik yang berkaitan dengan tema penelitian yaitu etika lingkungan dan informasi atau berita terkait kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Terakhir, observasi yang dilakukan oleh penulis adalah observasi non-partisipan, dimana penulis tidak terlibat langsung dalam kegiatan melainkan dengan cara mengambil jarak, untuk melakukan penginderaan berupa mengamati dan mendengar dalam suatu tempat, kejadian, perilaku, dan kegiatan.³³ Dalam penelitian ini, hal yang akan diobservasi adalah tiga wilayah regional yang terdapat problematika dikarenakan adanya

³³ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)," *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017): 21, <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>.

kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah ini. Seluruh proses pengumpulan data dilakukan dalam rentang waktu bulan Maret-Juni 2025.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada Huberman, dkk³⁴ yang meliputi: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penjelasannya sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses seleksi, penyederhanaan, dan pengabstrakan data mentah yang telah didapatkan dari wawancara, studi dokumentasi. Dalam tahap ini, data yang tidak relevan atau berlebihan akan disingkirkan, sementara data utama yang berkaitan langsung dengan problematika kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah di DIY akan dipertahankan. Reduksi data membantu peneliti fokus pada inti penelitian serta mengeliminasi informasi yang dapat mengaburkan hasil.³⁵

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau bagan. Penyajian data bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami pola-pola yang muncul dari data yang dikumpulkan. Penyajian ini juga akan memungkinkan peneliti melihat hubungan antar-aspek, dalam hal ini

³⁴ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (United Kingdom: SAGE Publications, 2014), 10-11.

³⁵ Glenn A Bowen, "Document Analysis as a Qualitative Research Method," *Qualitative Research Journal* 9, no. 2 (2009): 27-40, <https://doi.org/doi/10.3316/QRJ0902027>.

adalah hasil analisis tentang problematika kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah DIY dalam perspektif etika lingkungan.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan. Dalam proses ini, peneliti akan merumuskan temuan yang dihasilkan dari penyajian data dan memverifikasinya dengan mengacu pada teori-teori yang relevan. Kesimpulan yang valid memerlukan verifikasi secara berulang dengan membandingkan hasil temuan dengan data lapangan dari wawancara, dan dokumentasi.

F. Kerangka Teori

Kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah pada prinsipnya adalah kebijakan politik yang dibuat oleh pemerintah, dalam penelitian ini yang dimaksud adalah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kata kebijakan sendiri sering dikaitkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan, usulan-usulan dan rancangan-rancangan besar.³⁶ Sementara itu, yang dimaksud dengan kebijakan politik, menurut Thomas Dye adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan, atau tidak melakukan suatu tindakan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). James E Andersen mendefinisikan kebijakan politik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan politik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor lain di

³⁶ Abdul Wahab, *Analisa Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1997), 2.

luar pemerintah.³⁷ Dalam setiap kebijakan politik seringkali muncul problematika karena beberapa faktor seperti kurangnya komitmen dan kompetensi dari aktor kebijakan, kesalahan dalam mengidentifikasi masalah, distorsi akibat kepentingan politik, serta kurangnya koordinasi antar lembaga.³⁸

Dalam penelitian ini penulis mengangkat tema kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah di DIY, maka penulis perlu untuk berpijak pada suatu landasan filsafat yang mengungkapkan tentang idealitas suatu kebijakan. Untuk itu penulis bersandar pada gagasan Haryatmoko dengan konsep etika politiknya. Etika politik itu sendiri, jika merujuk pada Franz Magnis Suseno, menjelaskan bahwa etika politik adalah filsafat moral mengenai dimensi politis kehidupan manusia. Dimensi politis itu adalah dimensi masyarakat sebagai keseluruhan. Jadi, yang menjadikan khas suatu pendekatan yang disebut sebagai “politis” itu terjadi dalam landasan yang berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan. Sebuah keputusan maupun tindakan, baik dari kalangan politisi (orang yang bertugas mengurus wilayah politis) maupun individu dari masyarakat biasa, ketika itu bersifat politis dan dipilih atas dasar pertimbangan masyarakat secara keseluruhan, maka itu dinyatakan sebagai dimensi politis manusia.³⁹ Sementara itu, Haryatmoko lebih jauh memandang bahwa suatu konsturksi politik harus didasarkan pada filsafat politik yang dilandasi oleh

³⁷ Sholih Muadi, Ismail MH, and Ahmad Sofwani, “Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik,” *JRP (Jurnal Review Politik)* 6, no. 2 (2016): 195–224, <https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.2>.

³⁸ Indra Kristian, “Kebijakan Publik Dan Tantangan Implementasi Di Indonesia,” *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial* 21, no. 2 (2023): 88–98, <https://doi.org/doi.org/10.54783/dialektika.v21i2>.

³⁹ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), 19–22.

muatan moral. Artinya, tindakan politik mau tidak mau harus didasarkan pada moralitas, dengan kata lain adalah etika politik. Haryatmoko menjelaskan bahwa filsafat politik bukanlah ilmu politik, ilmu politik menjelaskan tentang data dan fakta-fakta empiris yang berkaitan dengan praktik perpolitikan praktis. Sementara filsafat politik berbicara tentang hakikat dari politik itu sendiri, bertujuan untuk memahami politik secara lebih dalam dan mendasar. Dan, Haryatmoko menyatakan bahwa filsafat politik adalah suatu dorongan yang titik berangkanya adalah moral. Ia menegaskan bahwa politik tidaklah seperti apa yang dikonstruksi oleh politikus, tetapi yang dipahami oleh orang yang menjelajahi makna serta nilai di dalam politik itu. Jadi, perlu ditunjukkan bahwa filsafat politik beranjak dari moral. Berdasarkan itu, Haryatmoko menyakini bahwa moral menjadi titik tolak filsafat politik dan amat penting karena dengan itu nurani menjadi terketuk. Maka, kebijakan politik harus didasarkan kepada moral, yang justru dengan itu pula menjadi dasar rasionalitas kegiatan politiknya.⁴⁰

Oleh sebab itu, penelitian ini berpijak pada kerangka teori etika politik Haryatmoko yang sesuai dengan kebutuhan penulis, yakni tentang bahwa kebijakan politik harus didasarkan kepada moral, yang artinya adalah kebijakan haruslah bersifat *bonum commune*: kekuasaan menjadi sah bila digunakan untuk memperjuangkan kebaikan bersama, yakni kesejahteraan yang

⁴⁰ Haryatmoko, *Etika Politik Dan Kekuasaan* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), 22-24.

memungkinkan setiap orang hidup bermartabat.⁴¹ Selanjutnya, secara eksplisit Haryatmoko menjelaskan tentang dimensi etika politik, yang secara sederhana dipahami sebagai bagian-bagian etis yang harus terwujud dalam suatu kebijakan politik. Dimensi inilah yang akan menjadi kerangka teori dalam penelitian ini untuk menguraikan data. Dimensi itu terdiri dari, *pertama*, dimensi tujuan (kebijakan atau *policy*). Dimensi ini membahas tentang tujuan-tujuan moral di balik kebijakan politik. Tentang bagaimana kebijakan politik tersebut mencerminkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Kebijakan harus didasarkan pada prinsip moral yang menghargai pluralitas dan hak asasi manusia.⁴²

Kedua, dimensi sarana (institusi atau polity). Dimensi ini mencakup sistem pengorganisasian dasar dan prinsip administratif negara serta lembaga sosial yang mendasarinya, hal ini sangat memungkinkan untuk mencapai tujuan.⁴³ Dimensi sarana memiliki dua prinsip normatif, yaitu: *pertama*, tatanan politik (hukum dan institusi) yang harus berlandaskan solidaritas, penghargaan atas pluralitas, serta struktur sosial ditata secara politik berdasarkan prinsip keadilan. *Kedua*, kekuatan-kekuatan politik ditata menurut prinsip timbal balik. Aspek moral dari dimensi sarana ini terdapat pada kesesuaian legitimasi politik dengan prinsip-prinsip etis.⁴⁴

⁴¹ Hendro Setiawan and Sokhinafa Daely, "Relevansi Agama Dalam Demokrasi Masa Ini," *Mitra Sriwijaya: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* 5, no. 1 (2024): 1–21, <https://doi.org/10.46974/ms.v5i1.115>.

⁴² Haryatmoko, *Etika Politik Dan Kekuasaan*, 25-28.

⁴³ Kari Palonen, "Four Times of Politics: Policy, Polity, Politicking, and Politicization," *Alternatives* 28, no. 2 (2003): 171–86, <https://doi.org/10.1177/030437540302800202>.

⁴⁴ Handoyo, Eko, Martein Hema Susani, and Moh Aris Munandar, *Etika Politik* (Semarang: Widya Karya, 2016), 60-61.

Ketiga, dimensi aksi politik (praktik atau politics). Dalam praktiknya, etika politik mengharuskan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan prinsip-prinsip moralitas tertentu. Menyoroti bahwa tindakan politik harus didasarkan pada rasionalitas moral yang mempertimbangkan dampak sosial dari setiap keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa etika dalam aksi atau pelaksanaan politik tidak hanya berkaitan dengan kepentingan individu, tetapi juga dengan kesejahteraan kolektif.⁴⁵

Dengan kerangka teori yang telah dijabarkan di atas, penulis akan dapat melihat secara lebih komprehensif tentang problematika yang terjadi dengan menelusuri dimensi-dimensi etikanya dalam kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah di DIY untuk melakukan analisis, kritik, dan rekomendasi akademik, berdasarkan keilmuan filsafat dalam studi etika lingkungan biosentrisme.

G. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian ini disusun dalam bab-bab yang terpisah untuk mempertajam fokus dan memudahkan tercapainya pemahaman. Penyusunan bab-bab dilakukan dengan tetap memperhatikan konsistensi, kesaling-hubungan, dan keutuhan persoalan yang dikaji dalam penelitian ini.

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri atas pemaparan tentang latar belakang mengapa penulis perlu melakukan analisis tentang etika lingkungan terhadap problematika kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah di DIY. Tujuan penelitian dipertegas melalui rumusan masalah yang dilanjutkan

⁴⁵ Haryatmoko, *Etika Politik Dan Kekuasaan* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), 27.

dengan deskripsi naratif tentang tujuan dan kegunaan teoritis dan praktis. Kajian pustaka disajikan guna mengetahui sejauh mana aspek-aspek tentang krisis sampah di Yogyakarta, dan paradigma keilmuan etika lingkungan telah diteliti oleh para peneliti sebelumnya. Bab ini juga memuat penjelasan kerangka teori, yang dilanjutkan dengan penjelasan mengenai metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II memuat uraian tentang subjek keilmuan berupa koseptualisasi etika lingkungan, tentang persoalan sampah, serta korelasi antara kebijakan politik dengan lingkungan. Secara lebih rinci bab ini akan menjelaskan tentang konsep aliran-aliran etika lingkungan baik yang berkembang dalam tradisi filsafat barat maupun Islam. Selain itu, pada bab ini juga akan menjelaskan mengenai sampah sebagai problematika lingkungan, mulai dari jenis-jenis, dan hubungannya dengan kesadaran manusia tentang lingkungan, serta ditutup dengan penjelasan mengenai korelasi kebijakan dengan lingkungan. Bab ini bertujuan untuk memberikan landasan konseptual dan penjelasan objek kajian agar penelitian ini dapat berjalan sesuai dengan rute keilmuan yang tepat.

Bab III memuat tentang uraian objek penelitian secara spesifik, yaitu kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah di DIY serta problematikanya. Bab ini megulas latar belakang, mekanisme, pihak yang terlibat, dan juga faktor pendukung serta penghambat kebijakan. Dilanjutkan dengan pemaparan tentang problematika yang terjadi dalam kebijakan. Penjelasan dimulai dari problematika pada dimensi tujuan, sarana, dan diakhiri dengan aksi atau

pelaksanaan. Pada bab ini akan disajikan data-data penelitian yang menjadi temuan di lapangan secara rinci.

Bab IV berisikan tentang uraian filosofis, yang berisi uraian tentang analisis etika lingkungan biosentrisme berdasarkan kerangka konseptual yang telah disusun. Penjelasan dimuali dari kritik mengenai pandangan antroposentrisme di dalam kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah dalam bingkai etika biosentrisme, yang dilanjutkan dengan kritik konstruktif terhadap kebijakan dengan tawaran rekonstruksi etika lingkungan biosentrism. Pada bab ini juga akan dimuat refleksi kritis dalam perspektif Islam.

Bab V merupakan penutup yang memuat Kesimpulan berupa ringkasan padat untuk menjawab pertanyaan penelitian. Bab ini akan memuat tentang keterbatasan penelitian sebagai kejujuran akademik dan ditutup dengan saran akademis untuk kemungkinan penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari penjelasan dan analisis data yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, sesuai dengan rumusan masalah yang telah disusun maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kritik biosentrisme terhadap kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta menyoroti dominasi paradigma antroposentrisme yang menempatkan manusia sebagai pusat yang mengakibatkan adanya dominasi manusia atas manusia lain, dan mengabaikan nilai serta keseimbangan komunitas biotik secara keseluruhan. Kebijakan ini menghadirkan berbagai problematika yang mencakup ketidakpastian regulasi, lemahnya pengawasan, ketidaktepatan sasaran kebijakan, praktik pembuangan sampah ilegal, serta konflik dan penolakan dari masyarakat yang terdampak. Seluruh problem itu mengindikasikan adanya egoisme antroposentrisme yang tidak mengakomodasi nilai moral penghormatan terhadap kehidupan biotis dan kelestarian ekosistem sebagaimana yang ditekankan dalam etika biosentrisme.
2. Rekonstruksi biosentrisme dalam kebijakan desentralisasi menuntut perubahan paradigma yang menempatkan manusia sebagai pelaku moral dari komunitas biotis yang setara dengan makhluk hidup lainnya. Maka, kesadaran akan bahaya sampah yang dapat mengancam organisme lain perlu diimplementasikan untuk menekan jumlah produksi maupun penggunaan sampah. Selain itu, biosentrisme menuntut adanya pertimbangan biosentris

dalam melaksanakan proses pengelolaan sampah di wilayah regional, yakni dengan menjamin integritas, stabilitas, dan keindahan alam setempat. Sekaligus juga menuntut adanya keadilan bagi masyarakat setempat yang memiliki kekawatiran biosentris. Serta menghembuskan narasi transcendental-teologis tentang kesalehan lingkungan melalui praksis pengelolaan sampah. Dengan demikian, kebijakan pengelolaan sampah tidak hanya berorientasi pada aspek teknis, melainkan juga pada penghormatan atas kehidupan secara menyeluruh untuk mencapai keberlanjutan lingkungan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Keterbatasan Penelitian

Untuk menunjukkan kejujuran akademik, penulis menguraikan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini. Hal ini agar segala data, analisis, dan tesis yang dikemukakan dapat dipahami sesuai dengan konteks yang tepat. Adapun beberapa keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini terbatas pada analisis filosofis yang hanya menggunakan paradigma etika lingkungan biosentrisme dalam kerangka teori dimensi etika politik. Padahal, problematika pengelolaan sampah di DIY ini cukup kompleks dan perlu dilakukan penelitian kolaboratif lintas paradigma maupun disiplin ilmu.
2. Penelitian ini terbatas pada waktu dan sumber data. Keterbatasan waktu dikarenakan data yang diperoleh hanya berada pada rentang waktu bulan Maret-Juni 2025. Rentang waktu tersebut tentu tidak memadai untuk memotret keseluruhan problem dan dinamika kebijakan. Selain itu,

keterbatasan sumber data dikarenakan penulis hanya menyajikan data secara generalisis, yaitu hanya berfokus pada pemerintahan Tingkat Provinsi, dan disatu sisi belum ada upaya untuk melihat secara lebih jauh karakteristik problematika di setiap wilayah regional yang terdampak.

Implikasi dari keterbatasan tersebut adalah bahwa hasil pemaparan yang dihasilkan bersifat pada konteks waktu dan data tertentu, dan idealnya digunakan sebagai bahan pertimbangan awal dalam evaluasi kebijakan. Keterbatasan analisis dan data juga berarti rekomendasi perlu didukung oleh penelitian lanjutan yang lebih komprehensif, baik dari segi metodologi, cakupan data, maupun perspektif analisis. Oleh karena itu, pengguna hasil penelitian harus memahami batasan ini agar tidak terjadi kesimpulan yang terlalu sempit atau tidak sesuai dengan perkembangan situasi di lapangan.

C. Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan, maka peneliti memiliki saran pengembangan penelitian sebagai berikut:

1. Persoalan sampah di DIY sangatlah kompleks, maka dari itu, perlu adanya penelitian lanjut dengan menggunakan paradigma etika lingkungan lain yang meyoroti tentang kurangnya kesadaran etis terhadap alam sehingga banyak yang dengan mudah membuang sampah sembarangan, atau menggunakan produk dengan potensi sampah yang besar. Misalnya penelitian yang merekomendasikan perubahan gaya hidup secara radikal menggunakan paradigma etika lingkungan ekosentrisme.

2. Persoalan sampah yang kompleks juga menuntut adanya penelitian lintas disiplin, misalnya menggabungkan dengan perspektif hukum, ilmu politik, dan ilmu lingkungan. Agar kebijakan desentralisasi ini dapat dikritisi secara komprehensif dengan argumentasi akademik sesuai dengan keilmuan tertentu.
3. Kebijakan desentralisasi ini menysar tiga wilayah regional dengan karakteristik lokalitas yang berbeda-beda. Penelitian selanjutnya hedaknya berfokus lebih dalam dengan mencoba mengeksplorasi dengan fokus pada satu wilayah regional tertentu, untuk diketemukan problematika mendasar dan pendalaman analisis sehingga tepat dalam meramu analisis dan rekomendasi menggunakan perspektif keilmuan tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abplanalp, Edward. "Respect for Nature: A Theory of Environmental Ethics." *International Dialogue Volume 3*, no. 28 (2013): 260–66. <https://doi.org/10.1080/21550085.2011.578364>.
- Adminwarta. "TPST Karang Miri Giwangan Kelola Sampah Jadi Pakan Ikan." Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta, 2023. <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/28708>.
- Agustinus Eko Susetyo, Nurhaidi, Tri Aji Purnomo, Emi Pratiwi Alfandy, Alif Utama, M akyas Abdurrahman, Syamsul Ma'arif. "Pelatihan Penggunaan Alat Pirolisis Sampah Organik Di Pantai Baru Bersama Bumkal Mukti Lestari Poncosari." *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* 7, no. 1 (2024): 55–62. <https://doi.org/doi.org/10.24912/jbmi.v7i1.28027>.
- Al-Adawiyah, Qinthary Hawwi. "Islam Dan Gaya Hidup Minim Sampah (Zerowaste Lifestyle): Telaah Konsep Ecosophy Sayyed Hossein Nasr." *Gunung Djati Conference Series* 24 (2023): 931–42. <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.
- Amalia, Shafiera. "Analisis Implementasi Program Bank Sampah Di Kota Yogyakarta." *Jurnal Analis Kebijakan* 1, no. 2 (2019): 34–48. <https://doi.org/10.37145/jak.v1i2.27>.
- Amstrong, J, and Richard G Botzerl. *Environmental Ethics: Divergence and Covergence*. New York: McGraw-Hill, 1993.
- Andani, Betty Epy, and Tri Wahyuni Sukesi. "Pengelolaan Bank Sampah Melalui Rumah Pilah Alam Lestari Di Dusun Ceme Kabupaten Bantul Yogyakarta." *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia* 21, no. 2 (2022): 200–209. <https://doi.org/10.14710/jkli.21.2.200-209>.
- Angelina, Nikita Dea, Putri Agustin, and Yahdi Oktama. "Kewenangan Tata Kelola Lingkungan Hidup Oleh Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah." *BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu* 9, no. 2 (2021): 204–22. <https://ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/43>.
- Aristoteles. *The Politics*. Middlesex: Penguin Books, 1986.
- Azzahra, Ravyola. "Evaluasi Pengelolaan Sampah Di Kawasan Pantai Kabupaten Bantul D.I.YOGYAKARTA." Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/31699/15513075RavyolaAzzahra.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Bachtira, Bachri S. "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif." *Teknologi Pendidikan* 10, no. 1 (2017): 46–62. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/139619>.
- Basri, Henny Hamdani, Heliwasnimar Heliwasnimar, and Ardimen Ardimen. "Etika Dan Moral Dalam Ilmu Pengetahuan." *Indonesian Research Journal on Education* 4, no. 1 (2024): 343–51. <https://doi.org/10.31004/irje.v4i1.494>.

- Bertens, Kees. *Etika*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Bowen, Glenn A. "Document Analysis as a Qualitative Research Method." *Qualitative Research Journal* 9, no. 2 (2009): 27–40. <https://doi.org/doi.org/10.3316/QRJ0902027>.
- Budiman, Raihan Chaerani Putri. "Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Etika Lingkungan." Universitas Gadjah Mada, 2024. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/245290>.
- Dari, Harnung wulan, and Suhartini. "Dampak Pengolahan Air Lindi Terhadap Kualitas Air Sungai Dan Sumur Di Sekitar TPA Regional Piyungan Yogyakarta." *Bioscientist : Jurnal Ilmiah Biologi* 12, no. 1 (2024): 71–91. <https://doi.org/doi.org/10.33394/bioscientist.v12i1.9601>.
- Faiz Kasyfilham, and Nuruddin Al Akbar. "Evaluasi Tata Kelola Sampah Yogyakarta Pasca-Piyungan: Studi Komparatif Dengan Model Ekonomi Sirkular Banyumas." *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik* 10, no. 1 (2025): 152–81. <https://doi.org/doi.org/10.25077/jakp.10.1.152-181.2025>.
- Febriadi, Ihsan. "Pemanfaatan Sampah Organik Dan Anorganik Untuk Mendukung Go Green Concept Di Sekolah." *Abdimas: Papua Journal of Community Service* 1, no. 1 (2019): 32–39. <https://doi.org/doi.org/10.33506/pjcs.v1i1.348>.
- Fitriani, Syifa, and Amalia Yuli Astuti. "Pemetaan Jaringan Sampah Plastik Di Kota Yogyakarta." *Jurnal PASTI* 15, no. 1 (2021): 73. <https://doi.org/doi.org/10.22441/pasti.2021.v15i1.007>.
- Handoyo, Eko, Martein Hema Susani, and Aris Munandar Moh. *Etika Politik*. Semarang: Widya Karya, 2016.
- Haris Firdaus, Regina Rukmorini, Mohamad Final Daeng. "Darurat Sampah Di Yogyakarta, Kenapa TPA Piyungan Sempat Dibuka Kembali?" Kompas.id, 2024. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/06/07/darurat-sampah-di-yogyakarta-kenapa-tpa-piyungan-sempat-dibuka-kembali>.
- Haryanti, Sri, Evi Gravitiani, and Mahendra Wijaya. "Studi Penerapan Bank Sampah Dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Yogyakarta." *Bioeksperimen: Jurnal Penelitian Biologi* 6, no. 1 (2020): 60–68. <https://doi.org/doi.org/10.23917/bioeksperimen.v6i1.10434>.
- Haryatmoko. *Etika Politik Dan Kekuasaan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003.
- Hasanah, Hasyim. "Teknik-Teknik (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)." *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017): 21. <https://doi.org/doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>.
- Heidegger, Martin. *Being And Time. Women's Philosophy Review*. Oxford: Blackwell Publishers, 2001. <https://doi.org/doi.org/10.5840/wpr19941219>.

- Hidayatullah, Amir, Rifki Khoirudin, Rahmat Saleh, Gea Dwi Asmara, Muhammad Safar Nasir, Universitas Ahmad Dahlan, Jalan Kapas No, and Semaki Yogyakarta. "Penguatan Upaya Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Kota Yogyakarta," 693–700. Yogyakarta: Seminar Nasional Hasil Pengabdian kepada Masyarakat, 2024. https://www.researchgate.net/profile/Gea-Dwi-Asmara/publication/381856361_Penguatan_Upaya_Pengelolaan_Sampah_Rumah_Tangga_Kota_Yogyakarta/links/6682a080f3b61c4e2ca108ba/.
- Ikhlesi, Hurairah Haqi, and M Sandy Firdaus. "Identifikasi Permasalahan Pengelolaan Sampah Di Daerah Istimewa Yogyakarta: Perspektif Kerjasama Antar Daerah Dan Peran Kelembagaan." *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau* 5, no. 1 (2025): 32–40. <https://appdev.ipdn.ac.id/jtpm/article/view/5117>.
- In'amuzzahidin, Muh. "Etika Politik Dalam Islam." *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 2, no. 2 (2016): 89. <https://doi.org/10.21580/wa.v2i2.382>.
- Irawan, Janika. "Tuai Penolakan, Pembangunan TPSS Srimulyo Dirembuk Ulang." *Joglo Jateng*, 2024. [https://joglojateng.com/2024/07/11/tuai-penolakan-pembangunan-tpss-srimulyo-dirembuk-ulang/#:~:text=Seperti diketahui%2C Selasa \(9/ini juga kewenangan pemerintah kabupaten](https://joglojateng.com/2024/07/11/tuai-penolakan-pembangunan-tpss-srimulyo-dirembuk-ulang/#:~:text=Seperti diketahui%2C Selasa (9/ini juga kewenangan pemerintah kabupaten).
- Isanabor, Philip Osarobu, Adidi Dokpesi Timothy, Philip Chika Omenukwa, and Mari Linda Vivian Onuoha. "Paul Taylor And The Quest For Environmental Sustainability." *IGWEBUIKE: An African Journal of Arts and Humanities* 10, no. 1 (2024): 15–27. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.31621.83688>.
- Ismail, Gunawan, Sahrul Sidik, Angga Adriana, and Irfan Fadhlillah Nugraha. "Identifikasi Sumber, Jenis Dan Kuantitas Sampah Domestik (Studi Kasus Perusahaan Jasa Kecil)." *Jurnal Syntax Admiration* 4, no. 10 (2023): 2092–2103. <https://doi.org/10.46799/jsa.v4i10.948>.
- Jardin, Joseph R. Des. *Environmental Ethics: An Introduction to Environmental Philosophy*. Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1993.
- Kant, Immanuel. *Groundwork of the Metaphysic of Morals*. Edited by Mary Gregor. Translated. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- Keraf, Sonny A. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.
- . *Filsafat Lingkungan Hidup: Alam Sebagai Sebuah Sistem Kehidupan*. Yogyakarta: Kanisius, 2024.
- Kristian, Indra. "Kebijakan Publik Dan Tantangan Implementasi Di Indonesia." *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial* 21, no. 2 (2023): 88–98. <https://doi.org/doi.org/10.54783/dialektika.v21i2>.
- Kurniawan, Heru, and Mukhamad Hamid Samiaji. "Prinsip Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berbasis Biosentris Dalam Perspektif Islam." *Nuanasa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Kajian Islam* 14, no. 1 (2017): 92–102.

<https://doi.org/doi.org/10.19105/nuansa.v14i1.1314>.

- Lenaini, Ika. “Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling.” *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1 (2021): 33–39. <https://doi.org/doi.org/10.31764/historis.v6i1.4075>.
- Leon, Yosef. “Mau Dibongkar, DLH Bantul Ambil Sampel Sampah Di TPSS Pandansari.” *Harian Jogja*, 2025. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2025/06/13/511/1216914/mau-dibongkar-dlh-bantul-ambil-sampel-sampah-di-tpss-pandansari>.
- Leopold, Aldo. *A Sand County Almanac With Essays on Conversation from Round River*. Oxford: Oxford University Press, 1966.
- Mahyudin, Rizqi Puteri. “Strategi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan.” *EnviroScientee* 10, no. 2 (2014): 80–87. <https://media.neliti.com/media/publications/278832-strategi-pengelolaan-sampah-berkelanjuta-9ff90f8c.pdf>.
- Making, Valentino Candra Ului, and F X E Armada Riyanto. “Etika Lingkungan Hidup: Upaya Pelestarian Alam Di Indonesia.” *JMAS Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 4 (2025): 1031–38. <http://melatijournal.com/index.php/JMAS>.
- Matin, Ibrahim Abdul. *Greendeen: Inspirasi Islam Dalam Menjaga Dan Mengelola Alam*. Jakarta: Penerbit Zaman, 2021.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. United Kingdom: SAGE Publications, 2014.
- Muadi, Sholih, Ismail MH, and Ahmad Sofwani. “Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik.” *JRP (Jurnal Review Politik)* 6, no. 2 (2016): 195–224. <https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.2.195-224>.
- Muharuddin. “Peran Dan Fungsi Pemerintah Dalam Penanggulangan Kerusakan Lingkungan.” *JUTISI* 5, no. 2 (2019): 97–112. <https://doi.org/doi.org/10.33506/js.v5i2.544>.
- Mun'im, Zainul. “Etika Lingkungan Biosentris Dalam Al-Quran: Analisis Tafsir Pelestarian Lingkungan Hidup Karya Kementerian Agama.” *Suhuf* 15, no. 1 (2022): 197–221. <https://doi.org/10.22548/shf.v15i1.720>.
- Munir, M. Ied Al. “Corak Paradigma Etika Lingkungan: Antroposentrisme, Biosentrisme Dan Ekosentrisme.” *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan* 9, no. 1 (2023): 19. <https://doi.org/10.24235/jy.v9i1.10000>.
- Muthmainnah, Lailiy, Rizal Mustansyir, and Sindung Tjahyadi. “Kapitalisme, Krisis Ekologi, Dan Keadilan Intergenerasi: Analisis Kritis Atas Problem Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia.” *Mozaik Humaniora* 20, no. 1 (2020): 57. <https://doi.org/10.20473/mozaik.v20i1.15754>.

- Muthmainnah, Laily. "Tinjauan Filosofis Problema Pengelolaan Sampah." *Jurnal Filsafat* 18, no. 1 (2008): 35–46. <https://doi.org/doi.org/10.22146/jf.3514>.
- Naess, Arne. *Ecology, Community and Lifestyle*. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
- . "The Deep Ecology Movement: Some Philosophical Aspects." In *He Selected Works of Arne Naess*, 33–35. Dordrecht: Springer, 2005. https://doi.org/doi.org/10.1007/978-1-4020-4519-6_88.
- . "The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement: A Summary." *Inquiry* 16 (1973): 95–100. <https://doi.org/doi.org/10.1080/00201747308601682>.
- Nagel, P. Julius F. "Etika Lingkungan Hidup." In *Seminar Teknologi Kebumihan Dan Kelautan (SEMINTA II)*, 521–25. Surabaya: Insitut Teknologi Adhi Tama Surabaya, Indonesia, 2020. <http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/download.php?dataId=9906>.
- Namang, Raimundus Bulet. "Negara Dan Warga Negara Perspektif Aristoteles." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, no. 13 (2020): 247–66. <https://doi.org/doi.org/10.38043/jids.v4i2.2449>.
- Nasr, Sayyed Hossein. *Knowledge and the Sacred*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981.
- . *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man*. Australia: Mandala Unwin Paperbacks, 1990.
- Nazzaruddin. "Krisis Sampah Yogyakarta: Ketika Kebijakan 'Desentralisasi' Berujung Pada Pengalihan Masalah." *Jawa Pos Radar Jogja*, 2025. <https://radarjogja.jawapos.com/opini/656654557/krisis-sampah-yogyakarta-ketika-kebijakan-desentralisasi-berujung-pada-pengalihan-masalah>.
- nu.or.id. "Al-Qashash Ayat 77," n.d. <https://quran.nu.or.id/al-qashash/77>.
- Nurwanto, Iwan. "Soroti Persoalan Sampah Di Kota Jogja, LBH Yogyakarta: Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab, Harus Ada Inisiatif Dari Negara." *Jawa Pos Radar Jogja*, 2025. <https://radarjogja.jawapos.com/jogja/655337560/sorotipersoalan-sampah-di-kota-jogja-lbh-yogyakarta-jangan-saling-lempar-tanggung-jawab-harus-ada-inisiatif-dari-negara>.
- Palonen, Kari. "Four Times of Politics: Policy, Polity, Politicking, and Politicization." *Alternatives* 28, no. 2 (2003): 171–86. <https://doi.org/10.1177/030437540302800202>.
- Pangaribowo, Wisang Seto, and Dita Angga Rusiana. "Desentralisasi Sampah Di DIY, TPST 3R Kota Yogyakarta Dinilai Belum Siap." *Kompas.com*, 2024. <https://yogyakarta.kompas.com/read/2024/05/08/221146178/desentralisasi-sampah-di-diy-tpst-3r-kota-yogyakarta-dinilai-belum-siap?page=all>.
- Passmore, John. *Attitudes to Nature*. Oxford: Oxford University Press, 1995.

- “Pengelolaan Sampah Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.” Yogyakarta: Bappeda Yogyakarta, 2023.
https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/208-pengelolaan-sampah.
- Pranyoto, Victorianus Sat. “TPST Sendangsari Sleman Mulai Olah Sampah Menjadi RDF.” <https://www.antaranews.com/>, 2024.
- Putra, Hijrah Purnama, Enri Damanhuri, and Emenda Sembiring. “Sektor Baru Pengelolaan Sampah Di Indonesia (Studi Kasus Di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman Dan Bantul).” *Jurnal Sains & Teknologi Lingkungan* 11, no. 1 (2019): 11–24. <https://doi.org/10.20885/jstl.vol11.iss1.art2>.
- Putra, Terry Irawansyah, Nanik Setyowati, and Enggar Apriyanto. “Identifikasi Jenis Dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Rumah Tangga: Studi Kasus Kelurahan Pasar Tais Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma.” *Naturalis: Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan* 8, no. 2 (2019): 49–61. <https://doi.org/10.31186/naturalis.8.2.9209>.
- Rachels, James. *Created Form Animals: The Moral Implications of Darwinsm*. Vol. 17. Oxford: Oxford University Press, 1990.
- . *Created From Animals: The Moral Implications of Darwinism*. New York: McGraw-Hill, 1990.
- Regan, Tom. *The Case for Animal Rights*. Berkeley: University of California Press, 1983.
- Riskidianto, Benedictus Bima. “Etika Lingkunan Arne Naess Dan Implementasinya Dalam Memperbaiki Kerusakan Lingkungan Akibat Sampah.” *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama, Dan Kemanusiaan* 10, no. 1 (2024): 89–112. <http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/yaqzhan/index>.
- Sabatier, Paul A. “Top-Down and Bottom-Up Approaches to Implementation Research: A Critical Analysis and Suggested Synthesis.” *Journal of Public Policy* 6, no. 1 (1986): 21–48. <https://doi.org/10.1017/S0143814X00003846>.
- Sartre, Jean Paul. *Being And Nothingness: A Phenomenological Essay On Ontology*. New York: Washingyon Square Press, 1966.
- Setiadi, Yudistira Ananda, and Humaidi. “Konsep Etika Lingkungan Menurut Seyyed Hossein Nasr: Respon Terhadap Krisis Ekologi.” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 5, no. 1 (2025): 248–52. <https://doi.org/doi.org/10.55606/jurrish.v5i1.6807> Tersedia:
- Setiawan, Hendro, and Sokhinafao Daely. “Relevansi Agama Dalam Demokrasi Masa Ini.” *Mitra Sriwijaya: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* 5, no. 1 (2024): 1–21. <https://doi.org/10.46974/ms.v5i1.115>.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Volume 1: Ciputat, Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2005.

- Singer, Peter. *Equality For Animal!?* Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
- Sulaeman, Oton, R.W. Setiabudi Sumadinata, and Dina Yulianti. "Polemik Antara Antroposentrisme Dan Ekosentrisme Dalam Perspektif Filsafat Mulla Sadra." *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 19, no. 2 (2021): 161. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v19i2.4914>.
- Suliantoro, Bernadus Wibowo, and Caritas Woro Murdiati. *Perjuangan Perempuan Mencari Keadilan & Menyelamatkan Lingkungan; Telaah Kritis Etika Ekofeminis Vandana Shiva*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019.
- Surianti. "Analisis Karakteristik Sampah Organik Dan Anorganik Di Kota Baubau (Studi Kasus Kel. Tomba)." *Jurnal Media Inovasi Teknik Sipil UNIDAYAN* 11, no. 2 (2022): 77–81. <https://doi.org/10.55340/jmi.v11i2.1003>.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Tan, Siang Yong, and Yvonne Tatsumura. "Albert Schweitzer (1875-1965): A Reverence for Life." *Singapore Medical Journal* 55, no. 7 (2014): 351–52. <https://doi.org/10.11622/smedj.2014084>.
- Taylor, Paul. *Respect for Nature: A Theory of Environmental Ethics*. Princeton: Princeton University Press, 1986.
- Wahab, Abdul. *Analisa Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1997.
- Wardana, Ghufon Akbari, and Ana Azzahra. "Pencemaran Laut (Kajian Ecosophy Dalam Pandangan Seyyed Hossein Nasr Dan Refleksinya Terhadap Strategi Penanggulangan Pencemaran Laut Di Indonesia)." *Journal Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains* 4, no. 1 (2022): 43–48. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/saintek/kiiis/article/view/3283>.
- Widhiananto, Praditya Anggi. "Analisis Dampak Lingkungan Terhadap Komponen Abiotik Dan Biotik Dari Kegiatan Penanganan Sampah Pada TPST Piyungan Di Dusun Ngablak, Kalurahan Sitimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta." *Repository UPN Veteran Yogyakarta*. UPN Veteran Yogyakarta, 2022. <http://eprints.upnyk.ac.id/29692/>.
- Widjaja, Gunawan, and Affandi. "Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pelaku Pengelolaan Limbah B3 Yang Tidak Memiliki Izin: Studi Kasus Putusan Nomor 2132K/Pid.Sus-LH/206." *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 4 (2024): 243–51. <https://doi.org/doi.org/10.62335/8kwppk45>.
- Wijaya, Renaldi, Fajri A'ziiz, Abshar Alghifari, and Acep Hendrisal. "Etika Lingkungan Dalam Mengatasi Kerusakan Lingkungan Akibat Sampah." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral* (2023) 1, no. 2 (2023): 1–17.

<https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/445>.

- Wilujeng, Sri Rahayu. "Filsafat , Etika Dan Ilmu : Upaya Memahami Hakikat Ilmu Dalam Konteks Keindonesiaan." *Humanika* 17, no. 1 (2013): 79–90. <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika/article/view/5313>.
- X, Hamengku Buwono. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 314/Kep/2024 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Desentralisasi Pengelolaan Sampah Oleh Kabupaten/Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta (2024).
- Yokit, Agustinus Nicolaus. "Konsep Tuhan Dan Agama Menurut Alfred North Whitehead." *Media: Jurnal Filsafat Dan Teologi* 2, no. 2 (2021): 173–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.53396/media.v3i2.37>.
- Yudhoyono, Susilo Bambang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Pub. L. No. 18, 1 (2008).
- Yusari, Tiaranita, and Joni Purwohandoyo. "Potensi Timbunan Sampah Plastik Di Kota Yogyakarta Tahun 2035." *Jurnal Pendidikan Geografi* 25, no. 2 (2020): 88–101. <https://doi.org/10.17977/um017v25i22020p088>.
- Zuhri, Robby H Abror, Fahrudin Faiz, Muzairi. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Nazwar. Yogyakarta: FA Press, 2014.
- Zulkarnaen, Iskandar. "Studi Komparasi Etika Aristoteles Dan Imam Al-Ghazali." *DIROSAT: Jurnal Of Islamic Studies* 8, no. 1 (2023): 61–75. <https://doi.org/10.28944/dirosat.v8i1.1570>.